



## BERITA ACARA

# HASIL REVIU RENSTRA DAN IKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2020

**BERITA ACARA**  
**HASIL REVIU RENSTRA DAN IKU**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2020**

NOMOR : 990 /Kep.213 /BPKAD/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga, bulan Juni 2021, kami Tim Reviu **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 990 /Kep.213/BPKAD/2021 tanggal 11 Mei 2021 telah melaksanakan Reviu Renstra dan IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dengan Narasumber dari Bappppeda dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, yang menghasilkan rincian sebagai berikut:

**I. REVIU RENSTRA**

**A. Indikator Kinerja Tujuan**

a. Indikator Kinerja Tujuan Sebelum Reviu

No	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu)	Peningkatan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang Berkualitas
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Peningkatan kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Indikator Kinerja Tujuan

- Perlu perbaikan terkait redaksional tujuan.
- Perlu perbaikan indikator tujuan karena indikator tujuan tidak mencerminkan keberhasilan dari tujuan

c. Uraian Indikator Kinerja Tujuan Setelah Reviu

No	Tujuan	Indikator Tujuan Setelah Reviu	Keterangan
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang Berkualitas	Opini BPK	
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Penentuan Target Reformasi Birokrasi BPKAD di dasarkan tahun sebelumnya

B. Indikator Kinerja Sasaran

a. Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Reviu

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Hasil Opini BPK (Opini yang didapat dari Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya)	BPK RI
		Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu (Penetapan APBD tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan APBD yang di keluarkan oleh Kemendagri	Pedoman Permendagri

2	Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Nilai Sakip	Formulasi : Sangat Baik/Baik/Cukup/Buruk	INSPEKTORAT
			AA : >90-100	
			A : >80-90	
			BB : >70-80	
			B : >60-70	
			CC : >50-60	
			C : >30-50	
		D : >0-30		
		Tingkat Penyerapan Anggaran	Formulasi : <u>Realisasi Anggaran Tahun Berkenan x 100%</u> Pagu Anggaran yang dilaksanakan Tahun Berkenan	LRA SPKD
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Formulasi : Ada/ Tidak Ada (Penjelasan : Banyaknya atau Jumlah Terobosan yang dihasilkan oleh lembaga)	SKPD Bersangkutan
Indeks Pembangunan Zona Integritas	Formulasi : Nilai (Penjelasan : Hasil Penilaian LKE terhadap kelengkapan evidence/pendukung)	INSPEKTORAT		

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Indikator Kinerja Sasaran

- Perlu perbaikan redaksional indikator sasaran dan formulasi disesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017

c. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Setelah Reviu

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Sesudah Review	
			Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Hasil Opini BPK	BPK RI
		Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu (Penetapan APBD tidak melebihi 31 Desember)	Penetapan Perda APBD
2	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	Jumlah Nilai Aspek yang dievaluasi (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja)	Laporan penilaian Sakip Perangkat Daerah yang dirilis oleh Inspektorat (Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015)
		Tingkat Penyerapan Anggaran	Jumlah Anggaran yang diserap dibagi Jumlah Anggaran dikali 100 Persen	Laporan realisasi belanja yang dirilis oleh BPKAD
		Jumlah Inovasi	Jumlah Inovasi yang dibuat	Laporan inovasi yang dirilis oleh Bappppeda
		Indeks Pembangunan Zona Integritas	Jumlah Nilai Komponen Pengungkit (Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja,+ Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	Laporan penilaian Indeks Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah yang dirilis oleh Inspektorat (Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019)

### C. Indikator Kinerja Utama

- a. Indikator Kinerja Utama Sebelum Reviu  
Belum tercantum di dalam Renstra
- b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Indikator Kinerja Utama
  - Perlu dicantumkan di dalam Renstra tentang Indikator Kinerja Utama;
  - Indikator Kinerja Utama adalah Indikator Sasaran Terpilih yang menggambarkan *Core Bussiness* Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Oleh sebab itu, Indikator **Opini BPK** terhadap Laporan Keuangan yang menggambarkan *Core Bussiness* Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
  - Penetapan Indikator Kinerja Utama disimpan di Bab IV dan dibuatkan dalam bentuk tabel 4.2.
- c. Uraian Indikator Kinerja Utama Sebelum dan Setelah Reviu

Tabel 4.2  
Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan 2. Penetapan APBD Tepat Waktu



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	TARGET					Kondisi Akhir	Sumber Data
							2019	2020	2021	2022	2023		
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu (Penetapan APBD tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan APBD yang di keluarkan oleh Kemendagri	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Pedoman Permendagri

- b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Indikator Kinerja Utama
- Perbaiki Redaksional Tujuan dan Formulasi serta sumber data





Sumedang, 3 Juni 2021

Tim Reviu Renstra dan IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Mengetahui:  
Kepala  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Sumedang



1. Ketua : MIA ROHMIATIN S, S.STP., M.Si

1.

2. Sekretaris : SONDJAJA, S.Sos., MM

2.

3. Anggota : Drs. Hj. YAYAH ROKAYAH., M.Si

3.

4. Anggota : SUSANTI, SE., M.Si

4.

5. Anggota : MIA ROHMIATIN S, S.STP., M.Si

5.

Narasumber :

1 DENI SUHANDANI, S.SI., M.Si

1.

2 YAYAT RUHIYAT, S.STP., M.Si

2.